



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK**

2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rancangan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan disusun dengan mengacu pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RENJA SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Spektrum pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik.

Proses penyusunan RENJA ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2024 mengintegrasikan program Kabupaten Gresik. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2025 yang memuat prioritas pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan secara rinci dijabarkan dalam agenda dan sub agenda pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan Trantibum dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Gresik. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD.

Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan Tramtibum.

Oleh karena itu, program-program pembangunan Trantibum yang tertuang dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Kabupaten Gresik tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Permendagri ini juga mengatur tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah:

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 MAKSUD

Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3.2 TUJUAN

Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan penyusunan RKA, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Strategi dan Kebijakan
- 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, alokasi anggaran Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2023 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 23.082.978.831 dengan rincian Belanja Pegawai 14.575.492.000, Belanja Barang dan Jasa 8.507.486.800. Dengan pagu tersebut, realisasi Satuan polisi Pamong Praja sebesar 22.192.355.439,27 atau 96,14%. Sehingga terdapat silpa 890.623.360,73 atau 3,86% yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alokasi anggaran belanja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2023 dipergunakan untuk pelaksanaan 2 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mencapai target RENSTRA. Pada tahun 2023 seluruh pelanggaran Perda dan Perbup dapat ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2023 mencapai 100%. Pelanggaran Perda dan Perbup Tahun 2023 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yang sejumlah 530 pelanggaran meningkat menjadi 225 pelanggaran di Tahun 2023. Dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP telah melakukan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tahun 2023 terjadi 772 gangguan tibum tranmas seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya sehingga tercipta kondisi yang tertib dan kondusif. Dengan diterbitkannya

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Telah dibentuk Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT dengan target 1 Linmas per RT sudah terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2023 jumlah Linmas 6.595 orang yang tersebar di 5.897 RT. Namun demikian Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Gresik. Pembentukan jejaring kerja Satlinmas belum terwujud dan pembinaan kepada Satlinmas Desa/Satgas Kecamatan masih sangat minim. Sehingga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana; keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selengkapnya berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranngkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2024 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	12 Bulan	12	12	12	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

				Bulan	Bulan	Bulan				
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	138 Orang	138 Orang	138 Orang	100%	111 Orang	111 Orang	100%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			260 stel	260 stel	100%	260 stel	260 stel	100%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah fasilitas administrasi umum OPD	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	45 Paket	45 Paket	100%	9 Paket	9 Paket	100%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	62 Paket	62 Paket	100%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	1100 Paket	1650 Paket	1650 Paket	100%	1500 Paket	1500 Paket	100%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			300 paket	300 paket	100%	11 Paket	11 Paket	100%
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	180 Dokumen	180 Dokumen	100%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	100 Laporan	100 Laporan	100%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	100%	36 Rekening	36 Rekening	100%

1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 orang	126 orang	126 laporan	126 laporan	100%	133 Laporan	133 Laporan	100%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1 Tahun	44 Unit	44 Unit	100%	44 Unit	44 Unit	100%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas yang dibina Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	5,8% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	450 kali	450 kali	450 kali	450 kali	100%	450 kali	450 kali	100%
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1581 Orang	1581 Orang	100 dokume n	100 dokume n	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakattermasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	69 Orang	69 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	750 Orang	750 Orang	100%
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	335 kali	335 kali	340 Kasus	340 Kasus	100%	135 Kasus	135 Kasus	100%

	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	350 Kali	350 Kali	400 Kasus	400 Kasus	100%	38 Laporan	38 Laporan	100%
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	500 kali	500 kali	500 kali	500 kali	100%	500 kali	500 kali	100%
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	300 Laporan	300 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	100%	9 Laporan	9 Laporan	100%
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	190 Kali	190 Kali	550 Laporan	550 Laporan	100%	163 Laporan	163 Laporan	100%
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40 Kali	40 Kali	45 Laporan	45 Laporan	100%	55 Laporan	55 Laporan	100%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	2 Kali	2 Kali	3 Laporan	3 Laporan	100%	33 Laporan	33 Laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja digunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan sasaran target sesuai dengan tahun awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran

kinerja. Dari 2 (dua) indikator sasaran strategis yang di ukur, Ke 2 (dua) indikator kinerja sasaran kinerjanya 100% dalam hal ini pencapaian dikategorikan sangat baik.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pusat kawasan ekonomi dan perdagangan di ibu kota Kabupaten Gresik selama ini adalah di ruas jalan Gubernur Suryo, Samanhudi, Usman Sadar dan Sindujoyo, diwilayah tersebut tersedia 2 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasar Kota dan Pasar Baru), departemen store Ramayana, pusat makanan khas Gresik dan pertokoan, keterbatasan tempat dan fasilitas di dalam pasar maupun area disekitar sentra perdagangan mengakibatkan banyak bermunculan Pedagang kaki lima (PKL), padatnya parkir kendaraan dan angkutan umum menunggu penumpang.

Kondisi demikian yang masih berlanjut adalah jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, bahu jalan dan badan jalan menjadi semakin banyak sehingga menciptakan kawasan Gubernur Suryo sebagai kawasan yang tidak teratur karena badan jalan menyempit oleh PKL, kendaraan parkir dan angkutan umum menunggu penumpang yang berdampak arus lalu lintas macet, sampah tidak terangkut dan kotor.

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berada pada misi ke-4 Bupati yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Dengan misi tersebut maka ditetapkan sasaran Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat. Melihat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 yang mencapai 100%, diharapkan dapat meningkatkan capaian program nasional di urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam menegakkan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan guna membantu mewujudkan Kabupaten Gresik yang tentram dan tertib maka perlu kerja keras terprogram, terukur, berkelanjutan dan terkoordinatif agar dapat menghadapi tantangan – tantangan yang selama ini dihadapi antara lain :

a. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa menghuni area seluas 1.193,76 km² sehingga dapat dihitung ratio kepadatannya 1.030 jiwa/km². Sedangkan untuk jumlah Polisi Pamong Praja adalah 246 orang, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja seharusnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik ini idealnya adalah 300 orang. Tetapi itu tidak dijadikan masalah karena semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mempunyai semangat mengabdikan yang tinggi.

Tingginya kepadatan penduduk menuntut ketersediaan pemukiman dan infra struktur pendukung seperti jalan, sekolah, sentra perdagangan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi dan transportasi umum. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban yaitu adanya penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dan lain – lain.

b. Pertumbuhan Industri

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik terbesar disumbang oleh industri. Perkembangan sektor industri yang demikian besar

sangat menguntungkan dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal Gresik tetapi juga menjadi magnet bagi calon tenaga kerja luar daerah yang memicu tingginya tingkat urbanisasi ke wilayah Kabupaten Gresik. Selain itu industrialisasi juga menyumbang tingkat polusi yang cukup tinggi baik polusi air, udara maupun tanah. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.

Dari tantangan – tantangan yang dihadapi di atas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peluang – peluang dalam meningkatkan capaian kinerja pelayanan antara lain :

a. Pembangunan fasum fasos

Pembangunan fasum fasos menjadi konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk khususnya di kawasan perkotaan. Namun pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial harus dengan pertimbangan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

b. Koordinasi dengan stakeholders terkait

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak PERDA tidak dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran K3 secara independen, namun harus dengan stakeholders terkait baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Tanpa dukungan stakeholders terkait maka akan terjadi hit and run dalam penegakan PERDA.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 – 2030 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakan PERDA dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Berdasarkan hasil dari Forum OPD Tahun Anggaran 2024 Satpol PP Kab. Gresik dan pihak terkait agar saling mendukung dan terus mengawal program dan kegiatan tahun 2024 yang telah direncanakan oleh Satpol PP Kab. Gresik agar hasil dan tujuan yang diharapkan khususnya dari Satpol PP dan umumnya dari seluruh warga Kabupaten Gresik bias tercapai. Terutama peran

serta Satpol PP dalam membantu pemenuhan target PAD Kabupaten Gresik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
SATPOL pp Kabupaten Gresik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (RP.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Gresik	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	19,335,718,889	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Gresik	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	21,321,034,684	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	7,368,250	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	15,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,368,250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	12 Bulan	14,705,880,997	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	12 Bulan	15,144,299,074	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	14,705,880,997	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	15,144,299,074	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Gresik		1 Paket	24,301	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Gresik		1 Paket	377,575,910	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gresik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260 Paket	24,301	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gresik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260 Paket	377,575,910	
	Administrasi Umum Perangkat	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas administrasi umum OPD	6 Jenis	457,362,941	Administrasi Umum Perangkat	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas administrasi umum OPD	6 Jenis	1,158,165,700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 Paket	5,167,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 Paket	60,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	219,070,692	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	397,510,200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1850 Paket	74,783,236	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1850 Paket	178,737,500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gresik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	400 Paket	16,452,721	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gresik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	400 Paket	31,900,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	16,779,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	36,018,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	125,109,492	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	454,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	4,075,994,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	4,075,994,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	200,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	200,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 Laporan	3,875,994,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 Laporan	3,875,994,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	89,088,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	550,000,000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab.Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	89,088,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab.Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	550,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Gresik			6,655,523,368	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Gresik			2,680,901,757	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gresik	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	450 Kali	5,081,439,528	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gresik	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	450 Kali	940,951,757	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	350 kali	224,250,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	350 kali	77,356,757	

	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	550 Kali	110,064,900	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	550 Kali	113,595,000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120 Dokumen	4,660,336,030	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120 Dokumen	200,000,000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Gresik	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85 Orang	86,788,598	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Gresik	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85 Orang	550,000,000	

	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab.Gresik	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	500 Kali	1,526,846,240	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab.Gresik	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	500 Kali	1,564,950,000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	10 Laporan	290,662,540	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	10 Laporan	364,950,000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56 laporan	74,799,200	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56 laporan	100,000,000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	650 Laporan	1,161,384,500	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	650 Laporan	1,100,000,000	

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab.Gresik	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	47,237,600	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab.Gresik	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	175,000,000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab.Gresik	jumlah pelaksanaan pelatihan /bintek PPNS di Kab.Gresik	5 Laporan	47,237,600	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab.Gresik	jumlah pelaksanaan pelatihan /bintek PPNS di Kab.Gresik	5 Laporan	175,000,000	
	TOTAL				25,991,242,257	TOTAL				24,001,936,441	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi. Usulan dari para stakeholders disampaikan pada saat forum SKPD, dimana program dan kegiatan dari Satpol PP hanya mendapat saran untuk meningkatkan pencapaian kinerja dalam penegakan PERDA, tidak ada usulan program/kegiatan.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Table 2.4 **(Tabel T-C.32)**
Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Gresik
Satuan Polisi Pamong Praja

No .	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, maka penegakan Perda menjadi prioritas utama, sehingga terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah bertugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan aktifitas sehari – hari dengan aman dan tenang.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari rencana kerja Satpol PP Tahun 2025 yaitu MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT. Sedangkan sasaran rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut :
Untuk mencapai tujuan pertama “Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Kebudayaan Dan Toleransi Dalam Masyarakat” maka ditetapkan sasaran :

- **MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Persentase penanganan gangguan ketentraman yang diselesaikan.

- **MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 program dan 9 Kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Lokasi penyebaran Program dan Kegiatan dari Satpol PP Kab. Gresik ini meliputi semua daerah kabupaten Gresik dikarenakan semua kegiatan dari Satpol PP Kab. Gresik ini bersifat rutinitas seperti patroli, pengamanan dan lain-lain.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Table 2.7 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kab. Gresik		23,563,518,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,071,000,000
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Kab. Gresik	100 %	21,760,062,497	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	21,821,000,000

1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Kab. Gresik	7 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 dokumen	16,000,000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	7 DOKUMEN	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 DOKUMEN	16,000,000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	Kab. Gresik	12 bulan	14,705,880,997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	15,000,000,000
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	115 Orang/Bulan	14,705,880,997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		125 Orang/Bulan	15,000,000,000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi administrasi administrasi Kepegawaian Perangkat	Kab. Gresik	1 Paket	377,575,910	Dana Transfer Umum-Dana		1 Paket	525,000,000

	Perangkat Daerah	Daerah				Alokasi Umum			
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Gresik	260 Paket	377,575,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 Paket	525,000,000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah fasilitas administrasi umum OPD	Kab. Gresik	6 jenis	1,158,165,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	1,930,000,000
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	9 Paket	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	65,000,000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	62 Paket	397,510,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 Paket	950,000,000

1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	1500 Paket	178,737,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1750 Paket	100,000,000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gresik	11 Paket	31,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	225,000,000
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gresik	180 Dokumen	36,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Dokumen	130,000,000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	100 Laporan	454,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Laporan	460,000,000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan	Kab. Gresik	2 jenis	4,075,994,000	Dana Transfer Umum-Dana		2 jenis	4,250,000,000

	Daerah	OPD				Alokasi Umum			
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gresik	36 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	250,000,000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	133 Laporan	3,875,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		133 Laporan	4,000,000,000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Gresik	1 tahun	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	100,000,000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gresik	44 Unit	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44 Unit	100,000,000

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas yang dibina Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	Kab. Gresik	100 %	2,680,901,757	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3,250,000,000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Gresik	406 kali	940,951,757	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		406 kali	1,050,000,000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Gresik	140 Kasu s	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Kasus	250,000,000
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gresik	40 Lapor an	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		50 Laporan	100,000,000

	Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				Alokasi Umum			
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gresik	6 Dokumen	77,356,757	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	500,000,000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gresik	775 Orang	113,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		850 Orang	200,000,000
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan	Jumlah penegakan pelanggaran K3 (Ketertiban,	Kab.	400 kali	1,564,950,000	Dana Transfer		400 kali	1,900,000,000

	Bupati/Walikota	ketentraman, dan keindahan)	Gresik			Umum-Dana Alokasi Umum			
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Gresik	10 Laporan	364,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	550,000,000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gresik	60 Laporan	1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Laporan	150,000,000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Gresik	170 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		180 Laporan	1,200,000,000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan PPNS	Kab. Gresik	1 kali	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		1 kali	300,000,000

						Umum			
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Gresik	35 Laporan	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	300,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 2.8, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKAB. GRESIK

TAHUN 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasio nal	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						23,563,518, 364.00						25.071.000. 000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23,563,518, 364.00							25.071.000. 000,00	
	1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						23,563,518, 364.00							25.071.000. 000,00	

1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	20,882,616,571.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			-	21.821.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	16.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP		16.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	14,705,880, 997.00	Kab. Gresik, Kebom as, Kebom as	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggara an pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPemban gunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluru h Pegaw ai Satpol PP	-	15.000.000. 000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMON G PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang/b ulan	109 Orang/b ulan	109 Orang/b ulan	109 Orang/b ulan	14,705,880, 997.00	Kab. Gresik, Kebom as, Kebom as	LAIN- LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggara an pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluru h Pegaw ai Satpol PP		15.000.000. 000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMON G PRAJA
	1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi Kepegawaia n Perangkat OPD	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	377,575,910 .00	Kab. Gresik, Kebom as, Kebom as	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggara an pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluru h Pegaw ai Satpol PP	-	525.000.000 ,00	DINAS SATUAN POLISI PAMON G PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	242 Paket	242 Paket	242 Paket	242 Paket	377,575,910.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP		525.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	11,581,657.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomiPembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	1.930.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	60,000,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	-		65.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	285 Paket	285 Paket	285 Paket	285 Paket	397,510,200.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP		950.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13700 Paket	13700 Paket	13700 Paket	13700 Paket	178,737,500.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP		100.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				paket Paket	31,900,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPenguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		225.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	36,018,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		130.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan	347 Laporan	347 Laporan	347 Laporan	454,000,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		460.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	4,075,994,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	4.250.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

															yang agamis					
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	200,000,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		250.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	133 Laporan	133 Laporan	133 Laporan	133 Laporan	3,875,994,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		4.000.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	550,000,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	100.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	550,000,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		100.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas yang dibina Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis Persentase	100%	100%	100%	100%	2,680,901,757.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik	Seluruh warga Gresik	-	3.250.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

							Anggota Pamong Praja yang dibina Presentase penyelesaian pelanggaran Perda								yang agamis					
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	450 Kali	450 Kali	450 Kali	450 Kali	940,951,757.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik	-	1.050.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		250.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

							Ketertiban Umum													
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	625 Orang	625 Orang	625 Orang	625 Orang	550,000,000.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		100.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	141 laporan	141 laporan	141 laporan	141 laporan	77,356,757.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		500.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

							Penyuluhan, Patroli, Pengamana n, dan Pengawalan													
	1	0 5	0 2	2. 01	00 16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	113,595,000 .00	Kab. Gresik, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluru h warga Gresik		200.000.000 ,00	DINAS SATUAN POLISI PAMON G PRAJA	

	1	0	0	2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	500 Kali	500 Kali	500 Kali	500 Kali	1,564,950,000.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik	-	1.900.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	364,950,000.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		550.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala	154 Laporan	154 Laporan	154 Laporan	154 Laporan	1,100,000,000.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya	Seluruh warga Gresik		1.200.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

							daerah Sesuai SOP						(CHT)		berbasis kearifan Gresik yang agamis					
	1	0	0	2.	00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	67 Laporan	67 Laporan	67 Laporan	67 Laporan	100,000,000 .00	Kab. Gresik, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluru h warga Gresik		150.000.000 ,00	DINAS SATUAN POLISI PAMON G PRAJA
	1	0	0	2.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	175,000,000 .00	Kab. Gresik, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluru h warga Gresik	-	300.000.000 ,00	DINAS SATUAN POLISI PAMON G PRAJA

	1	0	0	2.	00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
	5	2	03	06		Jumlah Laporan Hasil Pengemb an dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	175,000,000 .00	Kab. Gresik, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluru h warga Gresik		300.000.000 ,00	DINAS SATUAN POLISI PAMON G PRAJA
	J U M L A H										24,001,936, 441.00							25.071.000. 000,00	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
2. Dengan ditetapkannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini akan dijadikan langkah awal perencanaan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja pembuatan renstra SKPD Satpol PP Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026;

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

Gresik, 10 Oktober 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gresik



AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740820 199412 1 001